



**Perubahan
Rencana Kerja
(Renja-P)
Tahun 2024
DINAS
PERTANIAN**

Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 telah selesai disusun. Perubahan rencana kerja tahun 2024 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2024 anggaran perubahan. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan perubahan Renja tahun 2024 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan perubahan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tabanan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan



I Made Subagia, S.Pi. M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Mendasari hal tersebut, setiap tahun Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyusun Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan sektor pertanian dalam arti luas di Kabupaten Tabanan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyusunan renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengampu 5 bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Pasarana dan Sarana, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perkebunan dan Bidang Penyuluh.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan rencana kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Perubahan rencana kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian nantinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang

akan ditetapkan dalam Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

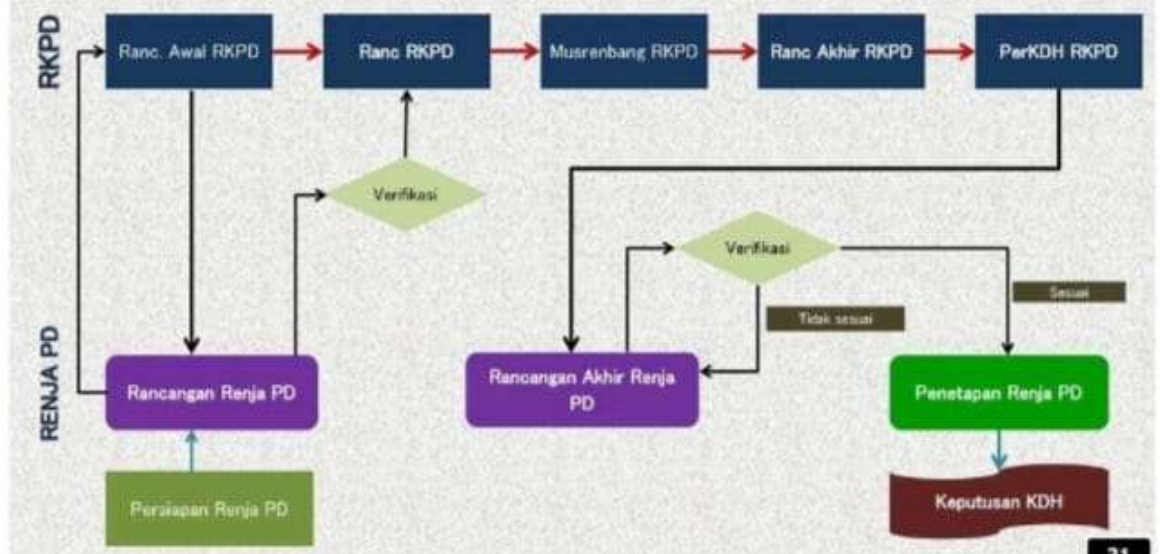
1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2024.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintah selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan rencana kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

Tahapan Renja PD



1.2 Landasan Hukum

Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
 - n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
 - o. Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);

- q. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);
- r. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2024 serta dana yang dibutuhkan.
5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Perubahan rencana kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Perubahan rencana kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
- Analisis pelayanan OPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Rivew terhadap rancangan awal RKPD
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Garis besar isi penyusunan perubahan rencana kerja dan kegiatan

Masyarakat: BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Target Kinerja 2024

3.2 Perubahan rencana kerja Kegiatan Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IITAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 32.619.185.536,- namun sampai triwulan kedua tahun 2024 baru terrealisasi sebesar Rp. 11.969.794.311,- dengan persentase 26,7%. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan III, sehingga SPJ belum bisa diampah. Disamping itu juga karena menunggu musim tanam

Beberapa program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diakibatkan oleh beberapa kendala yang dihadapi. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Adanya dampak el nino sehingga musim tanam tertunda menunggu ketersediaan air, mengakibatkan beberapa kegiatan belum bias diampah
- Adanya beberapa Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mengalami pergeseran sehingga memerlukan waktu untuk merealisasikan anggaran.
- Beberapa kegiatan seperti pupuk, benih baru bias direalisasikan saat musim tanam tiba. Sehingga realisasi kegiatan menunggu musim tanam dilakukan.

Dengan belum tercapainya realisasi anggaran di triwulan ke II, berimplikasi pada pengajuan anggaran kegiatan yang diusulkan serta adanya penyesuaian anggaran dan target indikator yang juga mengalami perubahan dengan tujuan mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor pendorong tidak terpenuhinya target realisasi kinerja adalah dengan:

- Lebih mencermati lagi aliran kas
- Mengevaluasi indikator (alat ukur) agar lebih terarah dan terukur sesuai dengan kriteria SMART
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk usulan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Adapun capaian kinerja hingga triwulan kedua tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian.s.d Tahun 2024 Kabupaten Tabanan

No	Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d RKPd Tahun 2023 (jumlah tahun 2022 + 2023)									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV									
1	2	3	4	5		8				9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Dinas Pertanian		100%	199.775.328.535			4.170.933.158		12.432.714.205,00		-			0	12.442.426.705,00	100%	87.686.451.391,00	100	44%		
1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	164.639.652.260		30%	4.161.220.658	60%	11.182.575.205,00		-			90%	11.182.575.205,00	190%	56.607.376.979,00	190	34%	Distan	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.000.000		20%	0	0	0		0			20%	0	0,2	8.319.850,00	20	17%	Distan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	27.500.000			0							0		4	4.981.533,00	40	18%	Distan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	5	22.500.000			0							0		2	3.338.317,00	40,0%	15%	Distan	

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaraan ya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	151.924.088.605		30%	3.992.756.790	30%	10.763.265.391	0	0	60%	10.763.265.391	160%	53.490.584.538,00	160,0%	35%	Distan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	144	151.756.956.495			3.992.756.790	144	10.763.265.391			144	10.763.265.391	288	53.458.925.972,00	200,0%	35%	Distan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	10	121.550.625			0		0			0	0	4	27.650.480,00	40,0%	23%	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan keuangan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (laporan)	10	45.581.485		0	0		0			0	0	4	4.008.086,00	40,0%	9%	Distan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaraan ya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.711.494.030		30%	2.886.000		6.782.100	0	0	30%	6.782.100	130%	210.366.431,00	130,0%	12%	Distan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	60	34.510.350					0			0		24	2.112.101,00	40,0%	6%	Distan

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (paket)	60	27.012.805				0				0	24	3.243.053,00	40,0 %	12%	Distan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)(	60	323.845.595		2.886.000	6	6.782.100				6	30	86.691.464,00	50,0 %	27%	Distan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	60	68.588.705				0				0	24	6.547.747,00	40,0 %	10%	Distan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (paket)	60	19.100.815	0	0		0				0	24	-	40,0 %	0%	Distan
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	60	671.199.510				0				0	24	83.800.894,00	40,0 %	12%	Distan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)	60	567.236.250				0				0	24	27.971.172,00	40,0 %	5%	Distan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0				0					
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD									0						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin						0				0					

		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	9.405.893. 625		30%	206.763.178	60 %	479.651.338		0		0	30%	479.651.338	130%	2.784.326.33 4,00	130, 0%	30%	Distan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat Menyurat (laporan)	60	53.309.02 0				5	1.870.000					5	1.870.000	29	18.400.000,0 0	48,3 %	35%	Distan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan (Paaket)	120	1.741.209. 665			41.185.310	6	65.253.624					6	65.253.624	54	341.629.429, 00	45,0 %	20%	Distan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (paket)	60	7.611.374. 940			165.577.868	6	412.527.714					6	412.527.714	30	2.424.296.90 5,00	50,0 %	32%	Distan
		Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Terpeliharany a Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.548.176. 000		30%	6.864.000	60 %	14.916.000		0		0	30%	14.916.000	130%	195.819.450, 00	130, 0%	13%	Distan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	250	648.176.0 00			6.864.000		14.916.000					0	14.916.000	100	139.721.930, 00	40,0 %	22%	Distan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)	200	900.000.0 00					0					0	0	80	56.097.520,0 0	40,0 %	6%	Distan

		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya																	
2	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	10%	14.090.714.055		0	0	554.791.000		0		0	0	554.791.000	10%	16.099.092.717,00	100,0%	114%	Distan
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	70%	13.444.746.310		0	0	55.092.500		0		0	0	55.092.500	0,5	11.790.772.401,00	71,4%	88%	Distan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	5	7.222.373.155			0	52.772.500					0	52.772.500	2	11.566.060.286,00	40,0%	160%	Distan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	5	6.222.373.155			0	2.320.000					0	2.320.000	2	224.712.115,00	40,0%	4%	Distan
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya (jenis)	6	630.543.865		0	0	937.000		0		0		937.000	2	252.215.477,00	33,3%	40%	Distan
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian(VUB)	20	630.543.865			0	475.000					0	475.000	4	62.957.613,00	20,0%	10%	Distan

		Pemanfaatan SDG Hewan tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanama n (jenis)	20	0			0	462.000					0	462.000	4	189.257.864, 00	20,0 %	#DIV/0!	Distan
		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak (ekor)	15	15.423.88 0	0	0	0	498.761.500	0	0	0	0	498.761.500	15	4.056.104.83 9,00	100, 0%	26298%	Distan	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/K ota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (paket)	195	15.423.88 0			16	498.761.500				16	498.761.500	94	4.056.104.83 9,00	48,2 %	26298%	Distan	
3	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN PRASARAN A PERTANIA N	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	10%	18.846.57 7.320	0	159.712.500	0	813.862.500	0	0	0%	973.575.000	10%	13.503.070.0 44,00	100, 0%	72%	Distan		
		Kegiatan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	2.223.594. 425	30%	150.000.000	40 %	63.925.000	0	0	70%	213.925.000	122%	2.420.451.70 8,00	203, 3%	109%	Distan		
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B (dokumen)	5	0							0		2	22.878.003,0 0	40,0 %	#DIV/0!	Distan		
		Koordiansi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordiansi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	20	2.223.594. 425		150.000.000	2	63.925.000			2	213.925.000	10	2.355.745.36 6,00	50,0 %	106%	Distan		
		Penyusunan Masterplan Pengembanga n Prasarana, Sarana dan	Tersedianya Data Statistik Pertanian (tahun)	5	0							0		2	41.828.339,0 0	40,0 %	#DIV/0!	Distan		

		Komoditas Perkebunan																		
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik (unit)	157	16.622.982.895		30%	9.712.500	60%	749.937.500		0	0	90%	759.650.000	77,9	11.082.618.336,00	49,6%	67%	Distan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	500	8.622.982.895									0		82	2.882.120.449,00	16,4%	33%	Distan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	360	8.000.000.000			9.712.500		749.937.500				0	759.650.000	22	8.200.497.887,00	6,1%	103%	Distan
		Pembangunan Rehabilitasi Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah jalan rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)																	
4	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	1.315.351.410			0		1.440.000		0	0	0	1.440.000	0,96	870.602.054,00	96,0%	66%	Distan
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (ekor)	21.000	1.092.002.135		0	0	0	0		0	0		0	8000	830.028.752,00	38,1%	76%	Distan

		Daerah Kabupaten/ Kota																		
		Pengendalian dan Penanggulan g an Penyakit Hewan Dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	5	1.092.002. 135									0		2	830.028.752, 00	40,0 %	76%	Distan
		Pemberantasa n Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota					1.942.500		8.082.500						10.025.000					
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	150	223.349.2 75		0	0	0	1.440.000		0		0	0	110	40.573.302,0 0	73,3 %	18%	Distan
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan (UUP)	40	223.349.2 75					1.440.000				0		0	40.573.302,0 0	0,0 %	18%	Distan
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	PROGRAM PENYULUH AN PERTANIA N	Persentase Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%	883.033.4 90		32%	0	32 %	163.773.030		0		0	64%	89%	1.040.037.12 7,00	197, 8%	118%	Distan
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	45%	883.033.4 90		32%	0	32 %	163.773.030		0		0		89%	1.040.037.12 7,00	197, 8%	118%	Distan
														0,64						

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	11	883.033.490				8.587.000					0	8.587.000	22	403.096.601,00	200,0%	46%	Distan
		Pegembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	10	0				87.401.030					0	87.401.030	20	569.155.526,00	200,0%	#DIV/0!	Distan
		Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			0				67.785.000						67.785.000		67.785.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Distan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1

Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
- g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
- h. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat; koordinasipelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang miliknegara/daerah;
- d. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dananggaran;
- f. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi

dankearsipan);

- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan..

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;

- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;

- h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatanhewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran padabidang penyuluhan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Oprasional Pembangunan Pertanian.

2.2.1 Kondisi Pelayanan

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka

secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai “*stake holder*”, maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensidan peluang pasar yang tersedia.

2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui terpenuhinya jumlah sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdatanya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petanitanaman pangan / subak dan perkebunan.

3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Deases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan

terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, survailans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBDI, APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan container, N2 Cair, Inseminasi Kit, kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran.

Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit

ataupun mati yang terkena penyakit-penyakit hewan yang bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasikan alat tersebut.

5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat. Tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian adalah menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke pertanian.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pertanian

adapun Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun
5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tanggapan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman

pangan dan hortikultura

7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura
9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura
11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).
17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan rencana kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan

sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum –forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing –masing. Pada akhir tahun anggaran 2024, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Tabel T-C.31
Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	31.485.650.893	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	25.282.406.400	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5,000,000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	29.003.977.693	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	23.493.741.000	
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	293.078.800	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	173.629.700	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	499.908.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran	100%	85.286.600	

						daerah		Tugas dan Fungsi PD			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.538.793.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.378.791.900,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	144.892.500	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Terpeliharanya a Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	145.957.200	
8	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	2.325.768.759	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	3.813.297.500	
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	55%	1.206.295.690	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	55%	1.797.364.500	
10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	3 jenis	170.103.594	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	3 jenis	167.793.000	
11	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500	949.369.475	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit	15 ekor dan 18500	1.848.140.000	

	Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain			pohon/Stek		Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain		Ternak	pohon/Stek		
1 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	4.410.096.579	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	3.135.190.436	
1 3	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	54%	875.500.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	54%	292.800.000	
1 4	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97%	3.534.596.579	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97%	2.842.390.436	
1 5	Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Tabanan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	802.241.875	Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Tabanan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	649.208.000	
1 6	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Kab. Tabanan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11000 ekor	761.725.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Kab. Tabanan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat	11000 ekor	617.725.000	

						kabupaten/ kota		Veteriner			
1 7	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Tabanan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	40.516.875	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Tabanan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	31.483.000	
1 8	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	615.727.850	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	896.600.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2024 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2024. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas
Pertanian Kabupaten Tabanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	
7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	
8	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	55%	
10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Kab. Tabanan	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	3 jenis	

	Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
11	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	
13	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	54%	
14	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Tabanan	Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97%	
15	Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Tabanan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	
16	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Kab. Tabanan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11000 ekor	
17	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Tabanan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	
18	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Tabanan	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	
1		Kab. Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Target Kinerja 2024

Ditahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2024 seperti yang di tampilkan pada tabel dibawah.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pertanian Tahun 2024 dan Perkiraan Maju
Tahun 2025 di Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab.Taban an	100%	25.282.406 .400	APBD		100%	30.985.742 .593
3.27.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Taban an	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
3.27.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab.Taban an	100%	23.493.741 .000	APBD		100%	29.003.977 .693
3.27.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Kab.Taban an	100%	139.820.00 0	APBD		100%	293.078.80 0
3.27.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung	Kab.Taban an	100%	0	APBD		100%	0

	Pemerintah daerah	Kelancaran Tugas dan Fungsi PD							
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Kab.Tabanan	100%	1.538.793.600	APBD		100%	1.538.793.600
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Kab.Tabanan	100%	107.535.000	APBD		100%	144.892.500
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Kab.Tabanan	10%	3.813.297.500	APBD		10%	2.325.768.759
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	Kab.Tabanan	60%	1.677.364.500	APBD		65%	1.206.295.690
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	Kab.Tabanan	4 jenis	167.793.000	APBD		5 jenis	170.103.594
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Kab.Tabanan	15 ekor dan 18500 pohon/Ste k	873.140.000	APBD		15 ekor dan 18500 pohon/Ste k	949.369.475
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Kab.Tabanan	10%	3.135.190.436	APBD		10%	3.673.071.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Kab.Tabanan	54%	227.800.000	APBD		58%	875.500.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Kab.Tabanan	117 unit	2.842.390.436	APBD		137 unit	2.797.571.000
3.27.04	Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab.Tabanan	97%	649.208.000	APBD		99%	658.241.875
3.27.04.2	Penjaminan	Jumlah	Kab.Tabanan	11000	617.725.00	APBD		11000	617.725.00

.01	Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	an	ekor	0			ekor	0
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Kab.Tabanan	120 dokumen	31.483.000	APBD		120 dokumen	40.516.875
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Kab.Tabanan	50%	896.600.000	APBD		60%	690.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	Kab.Tabanan	50%	896.600.000			60%	690.000.000

3.3 Perubahan rencana kerja Kegiatan 2024

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat. Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Ditahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2024. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan.

TABEL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN KAB. TABANAN
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Peran gkat Daerah h Pengu nggu ng Jawa b	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERTANIAN							39.639.485.956,00	32.619.185.536,00	33.776.702.336,00					38.332.824.227,00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							39.639.485.956,00	32.619.185.536,00	33.776.702.336,00					38.332.824.227,00			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							39.639.485.956,00	32.619.185.536,00	33.776.702.336,00					38.332.824.227,00			
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD				100 %	100 %	31.485.650.893,00	25.284.889.600,00	25.282.406.400,00							30.985.742.593,00	
	3	27	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 dokumen	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2001	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				3.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	2	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		7	1	0	0	1																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				2.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	2	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	-				2 dokumen	2 dokumen	29.003.977.693,00	23.493.741.000,00	23.493.741.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			29.003.977.693,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
		7	1	0	0	2																				

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					144 Orang/bulan	144 Orang/bulan	29.001.477.693,00	23.491.241.000,00	23.491.241.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			29.001.477.693,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	20	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	20	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggara administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	-			100 persen	100 persen	293.078.800,00	139.820.000,00	139.820.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		293.078.800,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	20	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.444.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			10.444.400,00	DINAS PERTANIAN	

																n						
	3	2	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
		7	1	. 0 6	0 0 3					1 Paket	1 Paket	9.925.000,00	2.990.700,00	12.990.400,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			9.925.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
		7	1	. 0 6	0 0 4					1 Paket	1 Paket	58.745.000,00	48.994.000,00	73.779.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			58.745.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
		7	1	. 0 6	0 0 5					1 Paket	1 Paket	12.442.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadila	1. Pangan, Sandang dan Papan			12.442.000,00	DINAS PERTANIAN

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	102.883.000,00	13.672.000,00	13.672.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				102.883.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	206	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	9.971.400,00	9.971.400,00	9.971.400,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				9.971.400,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	-				100 %	100 %	499.908.300,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit	12 Unit	299.908.300,00	0,00	0,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				0,00	DINAS PERTANIAN

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	7 Unit	0,00	0,00	85.286.600 ,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualitas dan Berkeadila n	1. Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINA S PERT ANIA N
	3	2 7	0 1	2 . 0 7	0 0 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.0 00,00	0,00	0,00		Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Bea Peroleh an Hak Atas Tanah dan Bangun an (BPHTB)	Memperku at Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualitas dan Berkeadila n	1. Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINA S PERT ANIA N
	3	2 7	0 1	2 . 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	-			100 persen	100 perse n	1.538.793. 600,00	1.538.793. 600,00	1.538.793. 600,00			Memperku at Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualitas dan Berkeadila n	1. Pangan, Sandang dan Papan	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah yang Mendukun g Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		1.538.793. 600,00	DINA S PERT ANIA N	
	3	2 7	0 1	2 . 0 8	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.496.500, 00	9.496.500, 00	9.496.500, 00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualitas dan Berkeadila n	1. Pangan, Sandang dan Papan			9.496.500, 00	DINA S PERT ANIA N	
	3	2 7	0 1	2 . 0 0	0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

				8	2																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	315.858.900,00	315.858.900,00	215.858.900,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				315.858.900,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2008	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.213.438.200,00	1.213.438.200,00	1.153.436.500,00	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				1.213.438.200,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharaan Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	-			100 persen	100 persen	144.892.500,00	107.535.000,00	107.535.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			144.892.500,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2009	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	117.982.500,00	89.995.000,00	91.995.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				117.982.500,00	DINAS PERTANIAN

	3	2	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	26.910.000,00	17.540.000,00	53.962.200,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			26.910.000,00	DINAS PERTANIAN
2	3	2	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian				10 %	10 %	2.325.768.759,00	2.718.297.500,00	3.813.297.500,00							2.325.768.759,00	
	3	2	0	2	.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	-			10 persen	10 persen	1.206.295.690,00	1.677.364.500,00	1.677.364.500,00			-	1. Pangan, Sandang dan Papan	Penggunaan Sarana Pertanian		1.206.295.690,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2	.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	255.000.000,00	1.518.751.500,00	1.588.751.500,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	1. Pangan, Sandang dan Papan			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3	2	0	2	0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	
		7	2	. 0 1	0 0 2		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	951.295.690,00	158.613.000,00	208.613.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			951.295.690,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2 .0 2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	peningkatan sarana pertanian	-			10 persen	10 persen	170.103.594,00	167.793.000,00	167.793.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pengelolaan Sumber Daya		170.103.594,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2 .0 2	0 0 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	120.103.594,00	119.443.000,00	119.443.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			120.103.594,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2 .0 2	0 0 4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																	

							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.000.000,00	48.350.000,00	48.350.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	02	206			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	persentase tersedianya sarana pendukung pertanian	-			10 persen	10 persen	949.369.475,00	873.140.000,00	873.140.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Penyediaan benih/bibit		949.369.475,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	206	004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				15 Dosis	15 Dosis	949.369.475,00	873.140.000,00	1.848.140.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			949.369.475,00	DINAS PERTANIAN	
3	3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian				10 persen	10 persen	4.410.096.579,00	3.070.190.436,00	3.135.190.436,00							3.673.071.000,00	
	3	27	03	201			Pengembangan Prasarana Pertanian	meningkatkan hasil pertanian tersedianya Prasarana Pertanian	-			10 persen	10 persen	875.500.000,00	227.800.000,00	227.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadila	1. Pangan, Sandang dan Papan	prasarana pertanian dalam kondisi baik		875.500.000,00	DINAS PERTANIAN

[illegible]

				2	3																			
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				58 Unit	58 Unit	1.590.000.000,00	1.524.645.000,00	1.524.645.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	1. Pangan, Sandang dan Papan				1.590.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2002	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2002	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	1.624.596.579,00	0,00	0,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan				0,00	DINAS PERTANIAN

[illegible]

	3	2	0	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	-			95 persen	95 persen	761.725.00,00	617.725.00,00	617.725.00,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	kesehatan hewan dan penerapan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner		617.725.00,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	761.725.00,00	617.725.00,00	617.725.00,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik -Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			617.725.00,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan vertiliner	-			95 persen	95 persen	40.516.875,00	31.483.000,00	31.483.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	kesehatan hewan dan penerapan pengawasan teknis kesehatan vertiliner		40.516.875,00	DINAS PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	

							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	40.516.875,00	31.483.000,00	31.483.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan			40.516.875,00	DINAS PERTANIAN
5	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi				85 %	85 %	615.727.850,00	896.600.000,00	896.600.000,00							690.000.000,00	
	3	27	07	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	produktivitas hasil pertanian ,perkebunan dan peternakan	-			50 persen	50 persen	615.727.850,00	896.600.000,00	896.600.000,00			-	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas		690.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	201	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pemban	-	1. Pangan, Sandang dan Papan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN	

															gunan Pertania n								
	3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
		7	7	0	0																		
				1	2		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	415.000.0 00,00	515.000.0 00,00	515.000.00 0,00	Kab. Tabanan , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualitas dan Berkeadila n	1. Pangan, Sandang dan Papan			415.000.0 00,00	DINA S PERT ANIA N
	3	2	0	2	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	
		7	7	0	0																		
				1	5		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	140.727.8 50,00	225.000.0 00,00	225.000.00 0,00	Kab. Tabanan , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik -Dana Ketahan an Pangan dan Pertania n	-	1. Pangan, Sandang dan Papan			225.000.0 00,00	DINA S PERT ANIA N

	J U M L A H	39.639.48 5.956,00	32.619.18 5.536,00	33.776.702 .336,00							38.332.82 4.227,00	
--	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--